

## ABSTRAK

**Aura Rafika Yusuf. 2026. Governansi Digital dalam Upaya Penanganan Penyalahgunaan Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Dibimbing oleh Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si dan Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan governansi digital dalam penanganan penyalahgunaan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada empat dimensi utama, yaitu *Institutional Arrangements*, *Information Relations*, *Technical Infrastructure*, serta *Monitoring and Control*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan governansi digital dalam layanan IKD belum sepenuhnya optimal dalam menangani risiko penyalahgunaan layanan digital. Hal ini ditunjukkan oleh keterbatasan kewenangan daerah yang masih bersifat sentralistik, belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) khusus, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan data pengaduan sebagai sistem monitoring dan deteksi dini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan masih cenderung bersifat administratif dan reaktif, serta belum berbasis pada pendekatan pengelolaan risiko digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas governansi digital memerlukan penguatan regulasi dan kewenangan daerah, penyusunan SOP yang lebih spesifik, peningkatan literasi digital masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan data dalam sistem pengawasan yang lebih terintegrasi.

**Kata Kunci:** Governansi Digital, Identitas Digital, Penyalahgunaan Layanan, Penipuan Digital

## **ABSTRACT**

***Aura Rafika Yusuf. 2026. Digital Governance Efforts in Handling Misuse of the Digital Population Identity (IKD) Service at the Population and Civil Registration Office of Makassar City. Supervised by Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si and Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si.***

*This study aims to analyze the implementation of digital governance in handling the misuse of Digital Population Identity (IKD) services at the Department of Population and Civil Registration of Makassar City. This research employs a descriptive qualitative approach focusing on four main dimensions, namely Institutional Arrangements, Information Relations, Technical Infrastructure, and Monitoring and Control. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The results show that the implementation of digital governance in IKD services has not been fully optimal in addressing the risks of digital service misuse. This is indicated by the limited authority of local governments that remains centralized, the absence of specific standard operating procedures (SOP), low levels of digital literacy among the community, and the suboptimal use of complaint data as a monitoring and early detection system. These conditions indicate that current handling efforts tend to be administrative and reactive, and have not yet been based on a digital risk management approach. This study concludes that improving the effectiveness of digital governance requires strengthening regulatory frameworks and local authority, developing more specific SOPs, enhancing digital literacy among the community, and optimizing data utilization within a more integrated monitoring system.*

**Keywords:** *Digital Governance, Digital Identity, Service Misuse, Digital Fraud*